

Pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja BPPKAD Kabupaten Brebes

The Effect Of Internal Supervision and Public Sector Accounting On The performance Of Brebes Regency BPPKAD

Reza Zaki Mubarak¹, Titi Rahmawati², Hilda Kumala Wulandari³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia.
e-mail : ¹rezazakimubarak18@gmail.com, ²titirahmawati165@gmail.com, ³hilda060791@gmail.com

Abstrak

Tanggung jawab instansi pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan tugas organisasi dalam mencapai tujuan, yang ditentukan oleh alat akuntabilitas yang sesuai standarnya yaitu pencerminan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal dan akuntansi sektor publik terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Brebes. Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah daerah kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini memiliki variabel independen sebanyak dua variabel yaitu pengawasan internal (x1) dan akuntansi sektor publik (x2) serta variabel dependennya yaitu kinerja instansi pemerintah daerah (y). Sampel penelitian ini adalah 49 pegawai yang sudah berstatus PNS di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dari BPPKAD kabupaten Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) pengawasan internal secara parsial berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, 2) akuntansi sektor publik secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah, 3) pengawasan internal dan akuntansi sektor publik secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Kata kunci : pengawasan internal, akuntansi sektor publik, kinerja instansi pemerintah daerah.

Abstract

The responsibility of government agencies for the success or failure of organizational tasks in achieving the objectives determined by accountability tools that comply with the standards, namely the reflection of the performance accountability system of government agencies. This study aims to determine the effect of internal application and public sector accounting on the performance of the Brebes district government. This research is classified as a quantitative research. The implementation of this research was carried out at the regional government office of Brebes district, Central Java Province. This study has two independent variables were internal control (x1) and public sector accounting (x2) and the dependent variable is the performance of local government agencies (y). The sample of this research is 49 employees who are already civil servants in the field of financial and asset management. This study uses data collection methods using a questionnaire given to respondents from BPPKAD Brebes district. The result show that : 1) internal control has a significant effect on performance of local government agencies, 2) public sector accounting hasn't a significant effect on performance of local government agencies, 3) internal control and public sector accounting have a significant effect on performance of local government agencies.

Keywords : internal control, public sector accounting, and performance of government agencies.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan daerah yang akuntabel diperlukan agar pengelolaan dana bisa efektif dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab dengan sistem akuntabilitasnya [1]. Dalam perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini terdapat fenomena meningkatnya tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah yang dipercayakan agar dapat mengelola sumber daya publik supaya tercapai pelayanan publik yang baik. Pengawasan akuntansi merupakan prosedur utama yang berhubungan langsung dengan keamanan harta benda serta aset organisasi agar catatan keuangan dapat dipercayai. Standar kerja yang sudah ditetapkan akan dibandingkan dengan kinerja aktual untuk mengetahui penyelewengan dan menjamin agar sumber daya yang ada digunakan dengan efektif dan efisien agar tercapainya tujuan dari organisasi yang dilakukan secara sistematis [2]. Pada dasarnya penggunaan pengawasan adalah menghindari kemungkinan penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai organisasi.

Analisa serta mekanisme akuntansi yang diterapkan dalam mengelola dana masyarakat dan lembaga negara pemerintah daerah biasanya menggunakan akuntansi sektor publik juga pada BUMN, BUMD dan LSM maupun yayasan sosial. Layanan publik disediakan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik adalah peran akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik terkadang berbeda dengan sektor swasta, penerapan akuntansi dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dan sifat lingkungan akuntansi tersebut [3]. Jadi, akuntansi sektor publik berperan sebagai penyedia layanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Pada dasarnya kinerja adalah hal yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh karyawan [4]. Kesimpulannya pencapaian instansi pemerintah sekarang merupakan hasil dari implementasi instansi sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat dilihat melalui informasi akuntabilitas kinerja yang telah dibuat. Informasi ini juga dibutuhkan sebagai dasar atau acuan untuk pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan oleh pihak manajemen dalam organisasi.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata jumlah penduduk 1.162 jiwa/km, dengan luas wilayah 1.769,62 km. Jumlah penduduknya terbesar kedua di Jawa Tengah setelah kabupaten Cilacap. Terdapat 292 desa, 5 kelurahan, di 17 kecamatan dengan ibukotanya adalah kota Brebes.

Dasar pembentukan BPPKAD kabupaten Brebes yaitu pada peraturan bupati Brebes No.102 Thn 2016. Agar terwujudnya manajemen keuangan pemerintah daerah dan pelayanan masyarakat yang prima serta optimal, maka dibentuk tugas jabatan struktural badan pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah.

Rumusan masalah observasi ini adalah bagaimana : (1) apakah pengawasan internal memiliki pengaruh pada kinerja instansi BPPKAD daerah kabupaten Brebes? (2) apakah penerapan akuntansi sektor publik memiliki pengaruh pada kinerja instansi BPPKAD daerah kabupaten Brebes? (3) apakah pengawasan internal dan penerapan akuntansi sektor publik secara bersama berpengaruh pada kinerja instansi BPPKAD daerah kabupaten Brebes?

KAJIAN LITERATUR

Pengawasan Internal

Pengawasan merupakan sebuah proses agar tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai serta menunjang kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan rencana awal, serta menjadi indikator terdapat hubungan yang dekat antara perencanaan dan pengawasan [5]. Inti dari pengawasan adalah mencegah agar tidak terjadi pemborosan, penyimpangan, penyalahgunaan, kesalahan, hambatan dan kegagalan dengan pencegahan secepatnya dalam menggapai tujuan awal dan melaksanakan tugas organisasi [6]. Sedangkan yang dimaksud pengawasan internal adalah diawasi oleh satuan

pengawas untuk membentuk organisasi itu sendiri. Dimana unit pengawasan tersebut bertindak atas perintah pimpinan organisasi, dan bertugas untuk menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi. Nilai kebijaksanaan pemimpin dapat diukur dari hasil pengawasan ini. Oleh karena itu pemimpin perlu meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah ia ditetapkan disaat menyusun perencanaan awal.

Maka disusun hipotesis H1 : pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada BPPKAD kabupaten Brebes.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi lembaga dan departemen tingkat tinggi nasional, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, BUMD, BUMN, atau project kerjasama dengan sektor publik dan swasta [7]. Sektor publik adalah sebuah organisasi kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik telah menyebabkan informasi yang lebih beragam untuk perencanaan dan pengendalian manajemen. Demikian pula bagi pemangku kepentingan di sektor public. informasi yang lebih beragam, andal, dan relevan dibutuhkan untuk mengambil keputusan [8]. Dan menurut definisi Biduri (2018:2), akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa yang kegiatannya berkaitan dengan bisnis, khususnya kegiatan keuangan, untuk menyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan untuk memenuhi publik yang berguna untuk organisasi [9].

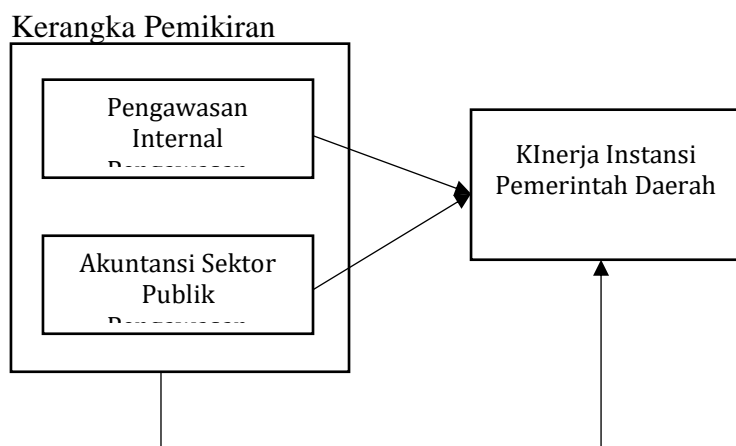
Maka disusun hipotesis H2 : akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada BPPKAD kabupaten Brebes.

Kinerja instansi pemerintah

Mukson (2020: 17) menuturkan jika indikator kinerja serupa dengan dasar perilaku yang dilihat pada saat ia bekerja [10]. Usaha seorang karyawan atau pegawai dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya yang dinilai dari kualitas dan kuantitasnya merupakan arti kinerja [11]. Satuan kerja pemerintah daerah adalah pusat sistem akuntabilitas dipimpin oleh orang yang bertanggungjawab pada entitas, dan satuan kerja lingkup pemerintahan daerah [12]. Namun menurut Sutrisno (2015:63) kinerja, yaitu pekerjaan yang diperoleh seseorang dalam melaksanakan kegiatan kerja yang ditinjau dari perilaku kerja selama bekerja [13]. Oleh karena itu, dapat disimpulkan jika kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan individu atau beberapa orang didalam organisasi berdasarkan tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Akuntabilitas publik adalah asas pertanggungjawaban pada publik. Artinya proses penganggaran seperti perancangan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan wajib melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap DPRD serta masyarakat dan menjadi indikator kinerja instansi pemerintah [14]. Jadi dapat disimpulkan jika pengawasan internal dan akuntansi sektor publik akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah

Maka disusun hipotesis H3 : pengawasan internal dan akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah pada BPPKAD kabupaten Brebes.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran****METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam hal ini yaitu penelitian kuantitatif yang memiliki landasan filsafat positivisme, dan dipakai untuk mengobservasi sampel pegawai pada instansi pemerintah dimana didalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai BPPKAD yang sudah PNS sebanyak 49 responden. Analisis data berbentuk statistik yang bertujuan untuk mengkaji hipotesis yang sudah ditentukan. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BPPKAD kabupaten Brebes yang terletak di jalan veteran no.11 kaumanbaru, Brebes. Kode pos 52212 provinsi Jawa Tengah. Dimana lokasi tersebut digunakan untuk observasi, wawancara, dokumentasi, dan menyebarkan kuesioner yang sudah dibuat.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengawasan internal (X1), akuntansi sektor publik (X2), dan kinerja instansi pemerintah (Y). Waktu penelitian ini dimulai dari 25 februari 2021 sampai 08 maret 2021 di kantor BPPKAD kabupaten Brebes. Observasi, wawancara serta dokumentasi digunakan untuk mencari informasi dan data pegawai tetap atau yang sudah PNS yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sedangkan kuesioner digunakan untuk mengetahui data tentang pengawasan internal, akuntansi sektor publik dan kinerja instansi pemerintah daerah di BPPKAD kabupaten Brebes.

Penelitian ini termasuk penelitian korelasional. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis uji hipotesis klasik, analisis regresi berganda uji f & uji t, dan uji korelasi determinasi. Tujuan pemilihan topik ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam apakah pengawasan internal dan akuntansi sektor publik berdampak pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Brebes dari perspektif internal instansi dan pegawai, kemudian diyakini bermanfaat untuk perbaikan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 1. Rata-rata, Standar Deviasi**

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi
Pengawasan Internal	53,26	5,659
Akuntansi Sektor Publik	31,46	3,542

Kinerja Pemerintah	Instansi	32,24	4,274
-----------------------	----------	-------	-------

Sumber : Microsoft Excel & SPSS 2021

Uji Validitas dan Realibilitas

Dibawah ini adalah hasil pengujian validitas dan realibilitas untuk masing-masing setiap pertanyaan dalam kuesioner pada variabel penelitian.

Uji validitas dan uji realibilitas pada variabel pengawasan internal

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Variabel	Indikator	Indikator Validitas	Hasil Validitas	Keterangan	Hasil Realibilitas	Keterangan
Pengawasan Internal	PI.1	0	.35	Valid	.78	Reliabel
	PI.2	2	.64	Valid		
	PI.3	6	.49	Valid		
	PI.4	0	.36	Valid		
	PI.5	8	.69	Valid		
	PI.6	0	.59	Valid		
	PI.7	1	.52	Valid		
	PI.8	8	.35	Valid		
	PI.9	6	.40	Valid		
	PI.10	8	.69	Valid		
	PI.11	8	.55	Valid		
	PI.12	4	.41	Valid		
	PI.13	5	.41	Valid		
	PI.14	1	.71	Valid		
	PI.15	9	.50	Valid		
	PI.16	6	.29	Valid		
	PI.17	9	.45	Valid		
		7				

Sumber : SPSS 2021

Uji validitas dan uji realibilitas pada variabel Akuntansi Sektor Publik

Variabel	Indikator	Indikator Validitas	Hasil Validitas	Keterangan	Hasil Realibilitas	Keterangan
Akuntansi Sektor Publik	ASP.1		.514	Valid	.605	Reliabel
	ASP.2		.422	Valid		
	ASP.3		.109	Tidak Valid		

ASP.4	.302	Valid
ASP.5	.618	Valid
ASP.6	.504	Valid
ASP.7	.631	Valid
ASP.8	.509	Valid
ASP.9	.570	Valid
ASP.10	.183	Tidak

Valid

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Dan Realibilitas

Sumber : SPSS 2021

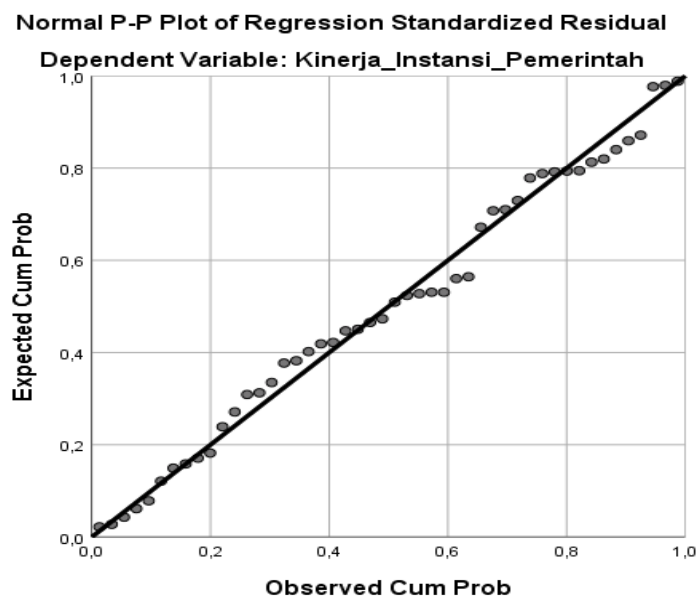
Uji validitas dan uji realibilitas pada variabel Kinerja instansi Pemerintah

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

bel	Varia	Indik	Ha	Keteran	sil	Ha	Keteran
	ator		sil Validitas	gan	Realibilitas	gan	
ja	Kiner	KIP.1	.3	Valid	59	.6	1
		98					
		KIP.2	.4	Valid			
		96					
		KIP.3	.4	Valid			
		74					
		KIP.4	.5	Valid			
		14					
		KIP.5	.5	Valid			
		41					
Instansi	Pemerintah	KIP.6	.5	Valid	59	.6	1
		87					
		KIP.7	.3	Valid			
		74					
		KIP.8	.4	Valid			
		00					
		KIP.9	.3	Valid			
		17					
		KIP.1	.5	Valid			
		0					
1	0	KIP.1	.3	Valid	59	.6	1
		00					

Sumber : SPSS 2021

Uji Asumsi Klasik



Gambar 2. Diagram P-P Plot Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas

Uji normalitas dipakai untuk penentu apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas yang dipakai adalah plot grafik. Jika titik-titik grafik mendekati sumbu diagonal, maka asumsi normalitas sudah terpenuhi. Hasil grafik dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Jika dilihat pada gambar diatas, plot dari nilai galat atau nilai standardized residual membentuk pola yang mendekati garis lurus yang menjadi indikasi bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients		Standardized Coefficients	VIF	Tolerance	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tol
1 (Constant)	0.877	1.8					
Internal Pengawasan	382		.497	.449	.001	.796	.256
Sektor Publik Akuntansi	028	6	.023	.160	.873	.796	.256

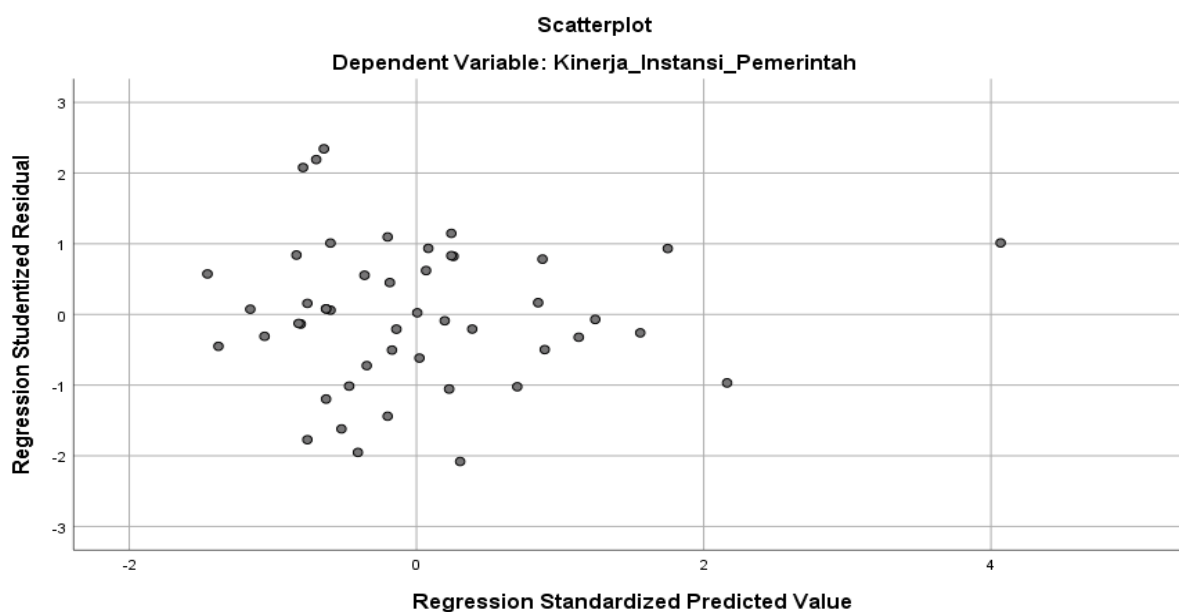
Dependent Variable Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber : Hasil Penelitian (2021)

Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas adalah jika nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 maka dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Dalam penelitian ini

sendiri memiliki nilai VIF : 1,256 dan tolerance lebih dari 0,1 senilai 0,796 maka dapat disimpulkan penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil penelitian (2021)

Dari hasil pengujian ini, gambar titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi diatas.

Analisis Regresi Berganda Uji T Dan Uji F

Uji T

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda (Uji t)

Coefficientsa					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
			Std. Error	Beta	
1	(Constant)	0.877	5.968		.822
	Pengawasan Internal	.382	.111	.497	.449
	Akuntansi Sektor Publik	.028	.176	.023	.160

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Pengawasan merupakan sebuah proses agar tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai serta menunjang kegiatan-kegiatan agar sesuai dengan rencana awal, serta menjadi indikator terdapat hubungan yang dekat antara perencanaan dan pengawasan [15]. Dapat disimpulkan pengawasan internal adalah pengawasan bentuk organisasi itu sendiri yang bertujuan untuk meninjau kembali kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang telah ditetapkan pada awal perencanaan. Dimana nilai kebijaksanaan pemimpin dapat diukur dari hasil pengawasan ini.

Pengujian Hipotesis pertama (H1)

Nilai Sig. Dari pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah $0,001 < 0,05$ maka bisa disimpulkan jika H1 diterima yang menandakan adanya pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes.

Biduri (2018:2), akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa yang kegiatannya berkaitan dengan bisnis, khususnya kegiatan keuangan, untuk menyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan untuk memenuhi publik yang berguna untuk organisasi [16].

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Nilai Sig. Dari pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah $0,873 > 0,05$ maka bisa disimpulkan jika H2 ditolak yang menandakan tidak adanya pengaruh Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes.

Akuntabilitas publik adalah asas pertanggungjawaban pada publik. Artinya proses penganggaran seperti perancangan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan wajib melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap DPRD serta masyarakat dan menjadi indikator kinerja instansi pemerintah [17]. Jadi dapat disimpulkan jika pengawasan internal dan akuntansi sektor publik akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah.

Uji F

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda (uji f)

ANOVAa						
Model	m	Su of f Squares	d an Square	Me	F _{ig.}	S
Regression	527	160.	2	80.	7	.
Residual	140	463.	4	10.	.799	001b
Total	667	623.	4			

Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah
Predictors: (Constant), Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Nilai Sig. Dari pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Public terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah $0,001 < 0,05$ maka bisa disimpulkan jika H3 diterima yang menandakan adanya pengaruh Pengawasan Internal dan Akuntansi Sektor Publik secara bersama-sama terhadap Kinerja Instansi Pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes. penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Reyhan (2017) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas keuangan terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja [18].

Uji Korelasi Determinasi

Tabel 8. Hasil Korelasi Determinasi

Model summary						
odel	M	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1		.507a	.257	.224		3.20812
Predictors: (Constant), Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal						
Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah						

Sumber: Hasil Penelitian (2021)

Jika dilihat pada tabel, maka besarnya koefisien determinasi (Adjusted R Square) dengan nilai 0,224 korelasi maka bisa disimpulkan jika pengaruh pengawasan internal dan akuntansi sektor public terhadap akuntabilitas kinerja BPPKAD kabupaten Brebes sebesar 22,4%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka bisa disimpulkan jika variabel pengawasan internal mempengaruhi variabel kinerja instansi pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes berdasarkan uji hipotesis pertama dengan nilai $0,001 < 0,05$. variabel akuntansi sektor publik tidak mempengaruhi variabel kinerja instansi pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes berdasarkan uji hipotesis kedua dengan nilai $0,873 > 0,05$. Serta variabel pengawasan internal dan variabel akuntansi sektor publik mempengaruhi variabel kinerja instansi pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes berdasarkan uji hipotesis ketiga dengan nilai $0,001 < 0,05$, dengan korelasi yang positif dan signifikan meskipun nilai Adjusted R Square 0,224 atau sebesar 22,4% dan sebanyak 77,6% dipengaruhi variabel lain yang diluar penelitian ini.

SARAN

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang diberikan kepada instansi pemerintah BPPKAD kabupaten Brebes yaitu untuk meningkatkan kinerja instansi ini maka tingkat pengawasan internal lebih dipertimbangkan dan diperbaiki lagi sehingga kegiatan organisasi maupun pengelolaan dana akan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Desy, S., 2016, *pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan pengawasan keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah*.

- [2] Abdul, H., 2018, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat, Jakarta.
- [3] Kabupaten Brebes. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Brebes.
- [4] Profil badan Publik Kabupaten Brebes. <https://bppkad.brebeskab.go.id/informasi-publik/profil-ppid>.
- [5] Sarwenda, B., 2018, *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: Univ. Muhammadiyah, Sidoarjo.
- [6] Edi, S., 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- [7] Sukanto Reksohadiprodjo. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta
- [8] Fauzy, A. N., 2013, *pengaruh pengawasan, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah*, Univ. Muhammadiyah, Surakarta.
- [9] Andre, R.K., 2016, *pengaruh karakteristik aparat pengawasan intern pemerintah (apip) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*, Univ. Negeri Padang, Padang.
- [10] Mukson, M., 2020, *Budaya Kerja dan Kompetensi Kerja: Kinerja Karyawan SPBU di Kabupaten Brebes*, Univ. Muhadi Setiabudi, Brebes.
- [11] Septiriane, s., 2013, *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja*, Univ. Komputer Indonesia, Bandung.
- [12] Lilis ,W., 2017, *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. Sukoharjo.
- [13] Ananda nicolla., 2019, *Pengaruh pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah*.
- [14] Sartika.,2019. *Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten muara enim*, Univ. Muhammadiyah, Palembang.
- [15] Indra, B., 2014. *Akuntansi Sektor Publik.In: Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, Univ. Terbuka, Jakarta.
- [16] Vita, P.P., 2019 *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Univ. Muhammadiyah, Surakarta.
- [17] Indraswari, K., 2010, *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah*, Univ. Diponegoro, Semarang.
- [18] Reyhan, H, F., 2017, *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*, Riau University, Pekanbaru.